

Petisi 1000

Ariel Heryanto

DALAM minggu ini nama "Petisi 1000" populer untuk menunjuk sebuah petisi protes yang ditanda-tangani 1000 warga negara Indonesia. Yang diprotes ialah penahanan 22 aktivis mahasiswa di Jakarta (November dan Desember 1993) karena menyatakan aspirasi politiknya lewat demonstrasi.

Penandatangan dan media massa

Tampaknya koran berbahasa Inggris terbitan ibukota, *Jakarta Post* edisi Sabtu 15 Januari 1994 merupakan media massa pertama yang memberitakan tentang Petisi 1000 ini. Berita itu ditempatkan di halaman pertama. Beberapa nama dari penandatangan yang disebutkan koran itu termasuk Ali Sadikin (bekas Gubernur Jakarta), Hogen (bekas Kapolri) dan sejumlah rekannya dari "Petisi 50".

Ada juga sejumlah nama pejuang hak-hak asasi manusia yang sudah kondang seperti Adnan Buyung Nasution, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Marsillam Simanjuntak, HJC Princen, Frans Hendra Winarta, Mulya W Kusumah, Nursyahbani Katjasungkana, Luhut Pangaribuan, Hendardi. Juga sejumlah tokoh lain dari berbagai latar belakang profesi: Abdurrachman Wahid, YB Mangunwijaya, Deliar Noer, HR Dharsono, Slamet Imam Santosa, Arief Budiman, Bakdi Sumanto, Mochtar Masoed, Aswad Mahasin, Sri Bintang Pamung-

kas, Semsar Siahaan dan sebagainya.

Pemberitaan *Jakarta Post* ini segera disambut oleh *headline Jawa Pos* dua hari berikutnya secara berturutan. Dalam edisi Minggunya, harian dari Surabaya ini memberitakan tanggapan simpatik Kapuspen ABRI Brigjen TNI Syarwan Hamid. Esoknya *headline Jawa Pos* melaporkan hasil wawancara dengan beberapa individu penandatangan Petisi 1000 itu.

Karena salah seorang dari demonstran yang ditahan itu kini sedang diadili, mungkin Petisi 1000 masih punya buntut lagi.

Menghargai maknanya

Munculnya Petisi 1000 sebagai topik berita baik dalam jurnalistik maupun dinamika politik kita bisa dimaklumi. Sampai-sampai Kapuspen ABRI merasa perlu memberikan tanggapan diplomatis dan berhati-hati kepada pers. Tetapi mungkin tidak ada jeleknya kita renungkan juga, apa makna dari Petisi semacam ini. Apa hikmah yang dapat dipetik darinya?

Apa yang hebat dari petisi itu? Jumlah penandatangannya yang sampai 1000? Kredibilitas individu yang menandatangani? Ketangkasan aktivis yang bekerja mengumpulkan penandatangan? Atau teks petisi

petisi kontemporer yang tandatangannya mendekati angka 1000 adalah surat pernyataan solidaritas bagi warga Kedungombo. Jadi kasusnya agak berbeda dari yang tadi, bukan penahanan atau pengadilan terhadap aktivis mahasiswa. Yang mungkin tidak jauh berbeda adalah identitas sosial penandatangan. Dalam surat tertanggal 5 Februari 1989, Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan di Kedungombo yang berasal dari penandatangan itu orang-orang sibuk yang tidak mudah dijumpai karena mobilitasnya.

Dari segi jumlah, Petisi itu memang jauh melampaui Petisi 50 yang sampai sekarang menjadi petisi paling tenar dan bergengsi karena ia tidak hanya berupa kumpulan tanda-tangan. Tapi, semacam gerakan yang lebih permanen dan punya agenda kerja berjangka-panjang.

Bicara tentang angka jumlah penandatangan petisi di tahun-tahun penuh demonstrasi belakangan ini, kita memang butuh perbandingan. Untuk kasus serupa, kita bisa tengok pernyataan solidaritas yang diberikan masyarakat kepada Bambang Subono dan Bambang Istri Nugroho. Keduanya pada tahun 1989 diadili sebagai terdakwa tindak pidana subversi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kita dikejutkan oleh adanya Pernyataan Bersama tertanggal 27 Agustus 1989, ditandatangani 615 orang yang menyesalkan pengadilan terhadap kedua pemuda itu.

Setahu saya satu-satunya

ini adalah salah satu petisi protes terpendek yang sejak adanya musim demonstrasi pasca NKK/BKK.

Walaupun pendek, teks Petisi 1000 ini relatif mudah bagi berbagai pihak untuk menyatakan dukungan bagi korban pelanggaran hak-hak asasi manusia. Para cendekiawan dan tokoh masyarakat dari latar-belakang dan bidang profesi berbeda semakin dipertemukan oleh sebuah aspirasi kemanusiaan yang global dan mendasar.

Perjalanan masih jauh

Sesudah menimbulkan beberapa hal yang membesarkan hati di sekitar timbulnya Petisi 1000 itu, pantas kita catat pula hal-hal lain yang tak kalah penting dan kurang menggembirakan.

Baik di sekitar timbulnya Petisi 1000 ini, maupun yang jauh di luarinya.

Pertama, timbulnya sebuah petisi protes semacam Petisi 1000 mengisyaratkan suatu berita duka di bidang hak-hak asasi. Tidak ada jaminan bahwa sebuah petisi akan langsung memperbaiki kondisi hak-hak asasi kita. Jauh lebih baik tidak ada pelanggaran hak-hak asasi, sehingga tidak ada keperluan dibuatnya petisi protes, daripada adanya petisi hebat biar pun dengan seribu atau sejuta tandatangan.

Kedua, layak diingat bahwa makna sebuah petisi tidak sepenuhnya ditentukan oleh jumlah penandatangan atau pun status sosial orang itu. Nilai sebuah petisi dapat dibentuk oleh ber-

bagai hal. Misalnya nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan yang diperjuangkan oleh petisi itu. Biar pun petisi itu ditandatangani oleh seorang warga negara. Biar pun dia seorang pelacur, gelandangan, penganggur, atau pencopet.

Petisi 1000 perlu dihargai bukan melulu karena jumlah 1000-nya. Atau karena elitisnya. Kita bersyukur karena berbagai tokoh masyarakat mau ikut menandatangani Petisi itu. Tapi jangan hal ini kita rayakan bagaikan sebuah festival para artis.

Akhirnya, pantas dicatat bahwa selama ini para aktivis mahasiswa bukanlah satu-satunya korban pelanggaran hak asasi. Bukan pula korban yang paling menderita. Atau hak asasinya lebih istimewa daripada para korban lain, sehingga memonopoli perhatian dan solidaritas kita sekalian.

Pembelaan dan pembebasan layak diperjuangkan tidak hanya bagi 22 mahasiswa yang belum lama ini ditangkap di Jakarta. Tetapi juga bagi semua (entah berapa ratus atau ribu) tahanan politik lain. Yakni, mereka yang ditahan hanya gara-gara membela suara-hati, nurani, keyakinan agamanya, kreativitas seninya, kegiatan ilmiahnya, atau aspirasi politiknya. ***

**) Ariel Heryanto, staf pengajar UKSW Salatiga*